

VERSI POKIN

LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN II TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUKODONO

Jl. GATOT SUBROTO NO. 95 Telp/Fax. 881 286

67352

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Sukodono yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Sukodono Triwulan II Tahun 2025 ini juga sekaligus bisa menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, Juli 2025

Camat Sukodono



DIAN NURWISUDAH K.H.P., S.Psi, MM

NIP. 19771023 200501 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	7
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	7
1.2. Isu Strategis.....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1. Pengukuran Kinerja	18
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	20
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	20
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	21
3.1.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	21
3.1.2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
3.1.2.5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	23
3.2. Realisasi Anggaran	29
3.3. Inovasi	30
BAB IV. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1	
Tabel Komposisi Pegawai	7
TABEL 1.2	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024	8
TABEL 2.1	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono	13
TABEL 2.2	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono sesuai dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024	14
TABEL 2.3	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....	14
TABEL 2.4	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024	15
TABEL 3.1	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	19
TABEL 3.2	
Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
TABEL 3.3	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sukodono...	20
TABEL 3.4	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	21
TABEL 3.5	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
TABEL 3.6	
Realisasi Anggaran 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1

bagan struktur organisasi dari Kecamatan Sukodono..... 1

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja dilakukan secara triwulan dan tahunan untuk yang tahunan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Sukodono menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

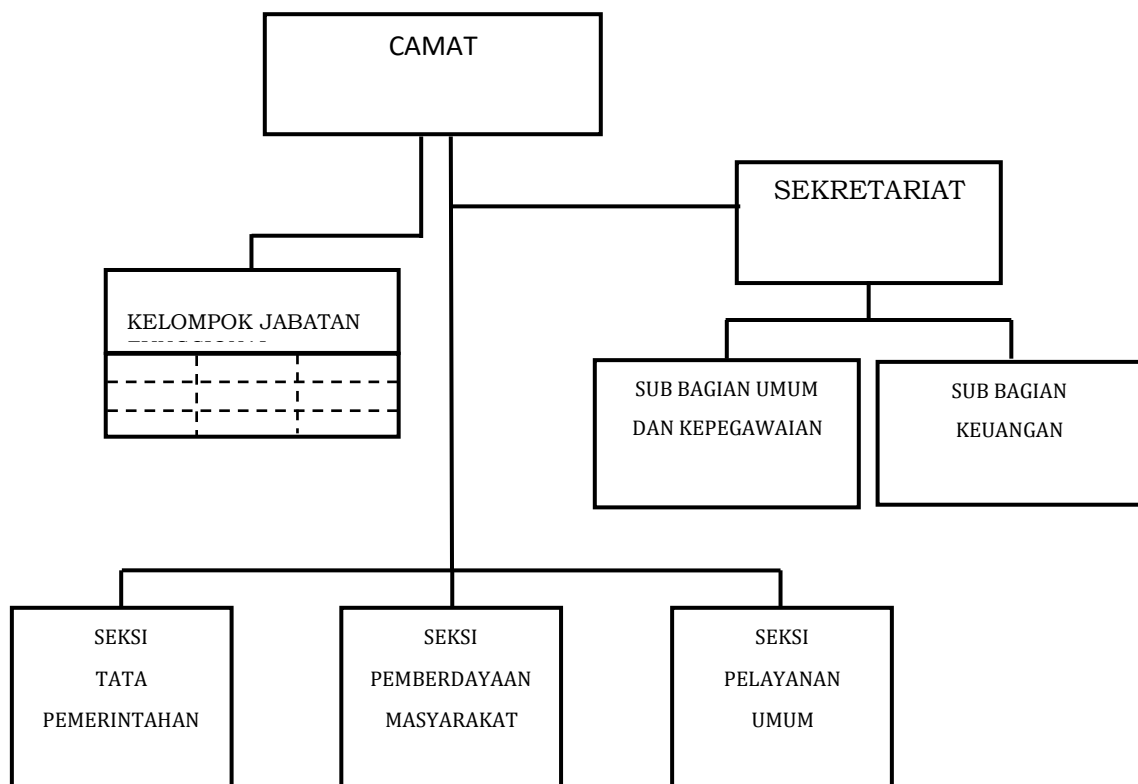
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sukodono merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Sukodono terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Sukodono adalah sebagaimana gambar berikut :



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sukodono melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Sukodono menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan untuk Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua unsure di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana – rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengekoordinasian dan fasilitasi pembentukan forumkomunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya; melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
11. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa danperaturan kepala desa;
12. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaankeuangan desa dan aset desa;
14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
15. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
16. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
17. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentianperangkat desa;
18. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
19. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, danpendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasanbatas desa;
20. Pengekoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
21. Melaksanaa evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas danprogram kerja Seksi Pemerintahan;
22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
23. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, danperijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.;

Untuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan; h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
12. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Sukodono didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang, dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat	1		1							1				1		
2.	Sekretaris		1	1						1						1	Plt
3.	Seksi Pemerintahan	1		1						1						1	
4.	Seksi Pelayanan Umum		1	1						1						1	Plt
5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1						1						1	
6.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1		1						1						1	
7.	Kasubag Keuangan		1	1						1						1	
8.	Staf	3	1	4					3	1							
9.	Tenaga Kontrak	4	2			6			2	4							
Jumlah		9	6	9	-	6	-	-	5	-	9	1	-	-	-	6	

- : Jabatan yang berwarna merah dapat diganti / diubah / ditambah/ dikurangi sesuai kondisi organisasi'

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Sukodono per 30 Juni 2025 sebanyak 15 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, dimana untuk jabatan Sekretaris dan Kasie Pelayanan Umum masih bersifat Plt, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 0 orang, pejabat PNS sebanyak 9 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan sebesar 67 % : 33 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sukodono selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Sukodono disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 30 Juni 2025

No	Nama Barang	Satuan	Keterangan/ Kondisi Barang			Jumlah
			B	RR	RB	
1	Tanah Kantor Kecamatan Sukodono	Buah	1	0	0	1
2	Portable Generating Set	Buah	1	0	1	2
3	Sepeda Motor	Buah	3	0	2	5
4	Station Wagon	Buah	1	0	0	1
5	Lemari besi	Buah	0	0	2	2
6	Mesin Ketik	Buah	0	0	4	4
7	Kipas Angin	Buah	0	0	7	7
8	Meja & kursi Eselon III B	Buah	1	0	0	1
9	Kamera Digital	Buah	0	0	1	1
10	UPS	Buah	0	0	10	10
11	Meja Eselon III A	Buah	0	0	2	2
12	Brankas	Buah	1	0	0	1
13	Meja Kursi	Buah	0	0	1	1
14	Lemari	Buah	0	2	0	2
15	Meja Kerja	Buah	0	0	1	1
16	Meja Kerja PKK	Buah	0	0	6	6
17	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
18	Televi si	Buah	0	0	1	1
19	Rak Kayu	Buah	1	0	1	2
20	Meja Podium	Buah	0	0	1	1
21	Meja Kayu	Buah	1	0	1	2
22	Kursi Putar	Buah	2	1	10	13
23	Sound System	Buah	1	0	1	2
24	Meja Operator Komputer	Buah	2	0	0	2
25	AC / Air Conditioner	Buah	12	0	1	13
26	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	Buah	0	8	0	8
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Buah	0	0	8	8
28	Almari Buku	Buah	1	0	0	1
29	Kursi Tamu / ZICE	Buah	0	1	0	1
30	Bangku Tunggu	Buah	0	2	0	2
31	Gordyn	Buah	16	0	0	16
32	Televisi / TV	Buah	2	0	3	5
33	Tape Recorder	Buah	0	0	1	1
34	STAVOLT	Buah	1	0	0	1
35	LCD Proyektor	Buah	1	0	1	2
36	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
37	Rak Buku : Kayu	Buah	1	0	0	1
38	Meja Kursi Tamu / Zice	Buah	0	1	0	1
39	Meja Rapat	Buah	0	1	0	1
40	Kursi Putar : Rapat	Buah	0	0	6	6
41	Karpet Lantai	Buah	3	0	0	3

42	Kamera Digital	Buah	0	0	1	1
43	Rak Buku	Buah	2	0	0	2
44	Papan Data	Buah	0	0	1	1
45	Neon Box / Papan Nama	Buah	0	0	1	1
46	Seketsel (Batas Ruangan)	Buah	0	0	1	1
47	Meja Pelayanan	Buah	0	0	1	1
48	Tangga Almunium	Buah	0	0	1	1
49	Almari Kayu	Buah	1	0	0	1
50	Meja Makan	Buah	1	0	0	1
51	Tempat Tidur	Buah	1	0	0	1
52	Lemari Es	Buah	0	0	1	1
53	Lemari Arsip	Buah	2	0	0	2
54	Meja Kursi Tamu/Sofa	Buah	1	0	0	1
55	Almari Es (Kulkas)	Buah	1	0	0	1
56	Sound System	Buah	1	0	0	1
57	Dispenser	Buah	1	0	0	1
58	Tangga Almunium Ukuran 6 m	Buah	1	0	0	1
59	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	2	0	0	2
60	Meja Kerja Eselon III	Buah	1	0	0	1
61	Kursi Kerja Eselon III	Buah	1	0	0	1
62	Filing Cabinet	Buah	1	0	0	1
63	Kursi Tunggu 4 set	Buah	2	0	0	2
64	Meja Rapat Panjang	Buah	2	0	0	2
65	Meja Komputer	Buah	1	0	0	1
66	Meja Kerja	Buah	2	0	0	2
67	Taplak Meja Pajang	Buah	1	0	0	1
68	Taplak Meja Pajang	Buah	1	0	0	1
69	Backdrop Tulisan "PATEN"	Buah	1	0	0	1
70	Kursi Pelayanan	Buah	6	0	0	6
71	Meja Pelayanan	Buah	1	0	0	1
72	Radio VHF	Buah	0	0	1	1
73	Pesawat Telephone	Buah	0	0	1	1
74	Faximel	Buah	0	0	1	1
75	Alat Potong KTP	Buah	0	0	1	1
76	Mesin Laminating	Buah	0	0	1	1
77	Kursi Roda	Buah	1	0	0	1
78	Komputer	Buah	4	5	13	22
79	Printer	Buah	9	0	24	33
80	Kelengkapan Komputer	Buah	0	0	1	1
81	Monitor	Buah	0	0	1	1
82	Laptop	Buah	2	1	2	5
83	Peralatan Komputer	Buah	0	0	1	1
84	Keyboard Laptop	Buah	0	0	1	1
85	Router	Buah	1	0	0	1

2.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Sukodono di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam memahami regulasi terbaru yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono terkait penilaian secara online oleh masyarakat dalam mendukung penilaian kinerja pelayanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sukodono disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	Angka		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$	Kasie dan Kasubag
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persentase	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintah desa}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sukodono sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Kepala Daerah dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sukodono disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik	Angka		Bag. Organisasi Setda Kab. Lumajang
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$	Kasie dan Kasubag
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persentase	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintah desa}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukodono Tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Sukodono
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78	-
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	-

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.708.453.311	1.691.070.183
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.022.500	7.800.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	160.700.500	159.104.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.400.000	23.400.000
	Jumlah	1.907.779.311	1.888.574.683

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan Sukodono tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025		Perubahan 2025	
			Target	Anggaran	Target	Angggaran
1	Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indek Pelayanan Publik		-	-	-
2	Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78	-	-	-
		2.Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	-	-	-
	Program 1 Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	1.708.456.311	100%	1.691.070.183
	Kegiatan 1 Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	10.203.000	100%	10.203.000
	Kegiatan 2 Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.374.599.182	100%	1.374.599.182
	Kegiatan 3 Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	1.422.750	100%	1.422.750
	Kegiatan 4 Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	41.514.979	100%	24.128.841
	Kegiatan 5 Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	202.677.600	100%	202.677.600
	Kegiatan 6 Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.038.000	100%	78.038.000
	Program 2 Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	8.022.500	100%	7.800.000

Kegiatan 1 Terlaksanakanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%	5.772.500	100%	5.550.000
Kegiatan 2 Terlaksanakanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	2.250.000	100%	2.250.000
Program 3 Terlaksanakanya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	160.700.500	100%	159.104.500
Kegiatan 1 Terlaksanakanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	107.750.500	100%	106.154.500
Kegiatan 2 Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	52.950.000	100%	52.950.000
Program 4 Terlaksanakanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000
Kegiatan 1 Terlaksanakanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100,00	-	100%	-
Program 5 Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	23.400.000	100%	23.400.000
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Semester		Realisasi Total	Capaian (%)
				Semester I	Semester II		
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	72,03	54,12	-	-	75,12
2.	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78	83,48	-	-	107
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	-	-	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan untuk semester I sudah terealisasi dengan hasil penilaian sebesar 54,12 dengan indeks 2,71 (Cukup) dengan target 72,03 sehingga memperoleh capaian sebesar 75,12%.

❖ **Sasaran Strategis**

1. Setelah dilakukan survey oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang untuk Indikator kinerja dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan per semester atau di triwulan II ini diperoleh nilai sebesar 83,48%.
2. Sedangkan untuk Indikator kinerja untuk Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan belum bisa terealisasi karena penilaian dilakukan pada akhir tahun oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target di Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja triwulan II/Semester I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi triwulan II/Semester I tahun 2025 dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025 Kecamatan Sukodono

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	72,03	54,12	75,12
2.	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78	83,48	107%
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	-	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi triwulan II/Semester I dan capaian kinerja Kecamatan Sukodono tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja tujuan untuk semester I sudah terealisasi dengan hasil penilaian sebesar 54,12 dengan indeks 2,71 (Cukup) dengan target 72,03 sehingga memperoleh capaian sebesar 75,12%.

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kinerja Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Setelah dilakukan survey oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang untuk Indikator kinerja dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan per semester atau di triwulan II ini diperoleh nilai sebesar 83,48%.

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Begitu juga dengan Indikator kinerja untuk Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan belum bisa terealisasi karena penilaian dilakukan pada akhir tahun oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang

3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Pada Triwulan II ini Kecamatan Sukodono melakukan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat

Kecamatan dengan Kecamatan Lumajang dimana nilai untuk indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Lumajang sebesar 85,29. Sedangkan Indikator kinerja untuk Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan belum bisa dibandingkan karena penilaian dilakukan pada akhir tahun oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

3.1.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target, antara lain sebagai berikut :

❖ **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, dengan indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hal pendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan :

- a. Sinergitas antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya Interaksi secara langsung kepada masyarakat tentang administrasi Kependudukan;
- b. Kurangnya efektifitas penerapan SP dan SOP Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Evaluasi Internal Aparatur Pelayanan secara berkala;
- b. Petugas Pelayanan diharuskan mengikuti diklat/webinar terkait dengan pelayanan public;
- c. Optimalisasi Sarpras yang ada dan pengajuan usulan Sarpras yang belum ada;
- d. Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial dalam keterbukaan Informasi terkait Pelayanan Publik pada Kecamatan dan optimalisasi kinerja Tim Pengaduan Masyarakat sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan.

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Hal pendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan :

- a. Sinergitas antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya Interaksi secara langsung kepada masyarakat tentang administrasi Kependudukan;

b. Kurangnya efektifitas penerapan SP dan SOP Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Evaluasi Internal Aparatur Pelayanan secara berkala;
- b. Petugas Pelayanan diharuskan mengikuti diklat/webinar terkait dengan pelayanan public;
- c. Optimalisasi Sarpras yang ada dan pengajuan usulan Sarpras yang belum ada;
- d. Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial dalam keterbukaan Informasi terkait Pelayanan Publik pada Kecamatan dan optimalisasi kinerja Tim Pengaduan Masyarakat sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan.

3.1.2.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Sukodono didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut: (Rumus : capaian kinerja - % Penyerapan anggaran)

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	107 %	0 %	0 %
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	0 %	0 %	0 %

Tujuan = Program Pelayanan, Sasaran 1 = 4 program, Sasaran 2 = 1 program

Pada Tabel tersebut di atas ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sukodono di Triwulan II Tahun 2025 masih belum terealisasi dikarenakan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

1. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Sukodono ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 78, terealisasi 83,48 sehingga capaiannya 107%. didukung dengan sasaran strategis :

B. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 44,18% sehingga capaiannya 44,18%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Tetap Menjaga Koordinasi yang lebih baik dan bersinergi antara aparatur yang ada di kecamatan;
- Mengikuti Webinar / Zoom Meeting untuk meningkatkan kapasitas SDA Kecamatan..

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Belum Terpenuhinya sarana dan Prasarana Kecamatan;
- Belum Terpenuhinya SDM Aparatur Kecamatan berdasarkan ANJAB ABK

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kinerja kegiatan Terefasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 18% sehingga capaiannya 18%. Target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 47,6% sehingga capaiannya 47,6%. Target bisa terealisasi

sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Pada triwulan I belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan berikutnya.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 32,4% sehingga capaiannya 32,4%. Target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% dan realisasi 31,7% sehingga capaiannya 31,7%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 24,7% sehingga capaiannya 24,7%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Kegiatan baru akan terlaksana sesuai jadwal di triwulan berikutnya.

Adapun factor keberhasilan Indikator program ini nantinya akan dapat terealisasi antara lain :

- Adanya kerjasama yang solid antar Aparatur Pelayanan dan perbaikan kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Unit Pelayanan masih belum maksimal dalam mengimplementasikan SP dan SOP pelayanan publik yang ada dikecamatan;
- Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan yang belum memadai;
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai;
- Keterbukaan Informasi terkait Pelayanan melalui media sosial masih kurang maksimal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sasaran kinerja Terlaksanakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Kegiatan baru akan dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan berikutnya.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sasaran kinerja Terlaksanakannya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan target 100% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 100%. Kegiatan baru akan dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan berikutnya.

3) Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran kinerja program Terlaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 10,46% sehingga capaiannya 10,46%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya Sinergi antara TP. PKK Kecamatan dan Tim Pokjanel Posyandu Gerbangmas Siaga Kecamatan dengan TP. PKK Desa dan Tim Pokjanel Posyandu Gerbangmas Siaga Desa.

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Sering terjadi pergantian Kader PKK maupun Kader Gerbangmas di Desa sehingga pelaksanaan tugas terkait administrasi maupun kegiatan menjadi tidak maksimal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sasaran kinerja Terlaksanakanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indicator Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan target 100% dan realisasi 5,49%. sehingga capaiannya 5,49%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sasaran kinerja Terlaksanakanya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indicator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 20,39% sehingga capaiannya 20,39%. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran kinerja program Terlaksanakanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 33,33% sehingga capaiannya 33,33%. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :
- Adanya sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Lintas Sektor. Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :
 - Masih terdapat adanya beberapa kejadian gangguan keamanan.
- Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sasaran kinerja Terlaksanakanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indicator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 1 Fasilitasi dan realisasi 1

Fasilitasi sehingga capaiannya 1 Fasilitasi. Hal ini tercapai karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Desa.

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 1 program yaitu:

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran kinerja program Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 3 indikator antara lain Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu dengan target 10 Desa, realisasi 0 desa sehingga capaiannya 0%, Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dengan target 10 Desa, realisasi 0 desa sehingga capaiannya 0% , Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu dengan target 10 Desa, realisasi 10 desa sehingga capaiannya 100%. Untuk Dokumen RKPDesa dan APBDesa baru akan terealisasi pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun factor keberhasilan Indikator program ini dapat terealisasi antara lain :

- Adanya Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait Penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)

Selain ada factor keberhasilan ada juga factor penghambat dalam pencapaian indikator program ini, antara lain :

- Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu namun cenderung di batas akhir pengumpulan;
- Masih diperlukannya pendampingan dalam Penyusunan Dokumen RKPDes, LPPDes dan APBDes.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sasaran kinerja kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dengan target 10 desa, Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dengan target 10 desa, Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dengan target 10 desa dan realisasi untuk semua dokumen 100%. Hal ini tercapai karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

sehingga target bisa terealisasi sesuai dengan harapan meskipun masih tetap membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan selain itu Adanya Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa terkait Penyusunan dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes).

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa mempunyai capaian kinerja yang belum bisa maksimal karena pelaksanaannya di sesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada triwulan berikutnya, yang tentunya juga berdampak pada capaian kinerja sasaran tersebut. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Sukodono tahun 2025 di triwulan II ini mengalami perubahan yang awalnya Rp 1.907.779.311,00 menjadi 1.888.574.683,00 dengan realisasi anggaran per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 767.564.261,00 atau sebesar 40,64 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.708.456.311	1.691.070.183	747.176.761	44,18%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.022.500	7.800.000	0	0%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	160.700.500	159.104.500	16.637.500	10,46%
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	2.400.000	33,33%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.400.000	23.400.000	1.350.000	5,77%

3.3. INOVASI

Inovasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Sukodono yaitu “PELARI CEPAT SAI” yang memiliki arti Pelayanan Sehari Cermat Tepat dan Selesai. Melalui program ini Kecamatan Sukodono akan mengoptimalkan dan mengupayakan pelayanan adminduk di wilayah Kecamatan Sukodono selesai sehari, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil dari pelayanan yang ada seperti penerbitan

dokumen Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Dalam pelaksanaan Inovasi “PELARI CEPAT SAI” Tim PATEN Kecamatan Sukodono dibantu Tim Adminduk Dispendukcapil Kabupaten Lumajang, dan juga bekerjasama dengan Pelayanan Publik di masing-masing Desa, siap memberikan Pelayanan kepada Masyarakat secara cermat, tepat dan selesai sehari. Diharapkan melalui Inovasi ini dapat memudahkan layanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Sukodono.

Adapun Alur Pelaksanaan Inovasi “PELARI CEPAT SAI” adalah:

Pertama, Masyarakat membawa persyaratan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan dokumen adminduk ke kecamatan. Hal ini dapat juga dititipkan oleh perangkat desa setempat untuk dibawa ke kecamatan.

Kedua, Operator adminduk kecamatan melakukan proses layanan secara Cermat, Tepat dan Selesai Sehari,

Ketiga, Setelah proses selesai, dokumen adminduk yang sudah jadi bisa diambil pemohon, kepada pemohon bisa ditunggu atau ditinggal terlebih dahulu dan bisa diambil kemudian atau terakhir saat jam pelayanan kantor tutup.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk Tujuan dari Kecamatan Sukodono yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indicator Indeks Pelayanan Publik. Pada semester I ini telah dilakukan penilaian oleh Bagian Organisasi Setda dengan hasil penilaian untuk Kecamatan Sukodono dengan target 72,03 mendapatkan nilai sebesar 54,12 dengan indeksnya 2,71 dengan kategori "CUKUP". Ada 6 komponen aspek yang menjadi indicator dalam penilaian IPP dan terlampir dalam Berita Acara yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang;
3. Untuk sasaran Kecamatan Sukodono yaitu Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan 2 indicator antara lain :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan dengan target 78 realisasi 83,48 sehingga memperoleh capaian sebesar 107%.
 - b. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target 80 belum bisa terealisasi karena penilaian baru akan dilakukan pada akhir tahun oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang.
4. Dan ada 5 indikator kinerja dari program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono yang terbagi ke 3 Kasie dan 2 Sub. Bagian, dimana secara keseluruhan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sudah terserap sebesar 44,91%.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:

- a. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan

dengan masyarakat;

- c. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti;
- d. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan;
- e. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desa-desa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi anggaran per program antara lain:

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa;
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu;
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;
8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran;
10. Mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran;
11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan Camat;
12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten;
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;

16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
21. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
22. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan;
25. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman, Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan dan Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

LAMPIRAN

1. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM.
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUKODONO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.708.453.311	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.022.500	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 160.700.500	DAU
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 23.400.000	DAU
JUMLAH		Rp. 1.907.779.311	



Lumajang, 10 Januari 2025

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
 NIP. 19771023 200501 1 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM**

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir.Hj.INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir.Hj.INDAH AMPERAWATI, M.Si.


DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUKODONO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	78
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.708.453.311	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.022.500	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 160.700.500	DAU
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 23.400.000	DAU
	JUMLAH	Rp. 1.907.779.311	


BUPATI LUMAJANG
Ir. H. LINDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 03 Maret 2025

CAMAT SUKODONO

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.
 NIP. 19771023 200501 1 009

2. MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x100 Jumlah fasilitasi dan koordinasi
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu ----- x100 (Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)
7.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat dipenuhi ----- x100 Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan
7.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi ----- x100 Jumlah fasilitasi Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan
7.01.01.2.01.0001	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
7.01.01.2.02	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana ----- x100 Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan

7.01.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani Gaji dan Tunjangan
7.01.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN yang terfasilitasi
7.01.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun
7.01.01.2.03	Terpenuhinya Fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD yang terlaksana ----- x100 Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD yang direncanakan
7.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun
7.01.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana ----- x100 Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan
7.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
7.01.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket penggandaan yang disediakan
7.01.01.2.06.0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD yang dilaksanakan
7.01.01.2.08	Terpenuhinya Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang dilaksanakan ----- x100 Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan
7.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Lap. rekening yang dibayar
7.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Lap. Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana
7.01.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan ----- x100 Jumlah Fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan
7.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara
7.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
7.01.02	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan ----- x100 Jumlah pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat
7.01.02.2.01	Terlaksanakannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan ----- x100 Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang direncanakan
7.01.02.2.01.0002	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun

7.01.02.2.04	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan
7.01.02.2.04.0003	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disusun
7.01.03	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan) ----- 2
7.01.03.2.01	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan
7.01.03.2.01.0002	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang disusun
7.01.03.2.01.0003	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.06	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan
7.01.03.2.06.0001	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.0006	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.0012	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

7.01.04	Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan
7.01.04.2.01	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
7.01.04.2.01.0001	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun
7.01.05	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
7.01.05.2.01	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
7.01.05.2.01.0008	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forumkoordinasi yang difasilitasi
7.01.06	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu -----x 100 Jumlah Desa

7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu
			Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu
			Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu
7.01.06.2.01.0002	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang disusun

3. Dokumentasi Kegiatan

LAPORAN FASILITASI PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLA KEUANGAN DESA SEMESTER I TAHUN 2025

- A. Dasar** : 1. Surat Camat Sukodono Nomor : 400.10.2.2/182/427.95/2025 tanggal 27 Mei 2024 perihal Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa
2. Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/006/427.95/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa.
- B. Maksud dan Tujuan** : Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa.
- C. Waktu Pelaksanaan** : Tanggal : 3 Juni s/d 19 Juni 2025
Pukul : 09.00 sampai dengan selesai
(Jadwal terlampir)
- D. Tempat** : 1. Desa Dawuhan Lor
2. Desa Klanting
3. Desa Kutorenon
4. Desa Bondoyudo
5. Desa Sumberejo
6. Desa Selokbesuki
7. Desa Urangganung
8. Desa Selokgondang
9. Desa Kebonagung
10. Desa Karangsari
- E. Pelaksanaan**
Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Semester I Tahun 2025 antara lain :
- 1. Desa Dawuhan Lor**
- Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Dawuhan Lor dengan Pagu Rp. 124.578.152 pembayaran Rp. 124.578.152 (100%).
 - SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
 - Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Darungan RW 005, 006, 007 dengan volume 206m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 156.387.800 progress pengerjaan masih 70% (material tersedia)

- Pembangunan TPT dan Plat Deuker Dusun dengan volume TPT 40m dan Plat Deuker 4,5m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 23.717.000 progress pengerjaan masih 5% (material tersedia, proses masih dalam penggalian)
- Pembangunan jalan Paving Conblock dengan volume 3,5m x 107m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 75.262.700 progress pengerjaan masih belum dikerjakan.

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Siltap Perangkat Desa bulan Januari-Maret	65.519.154	terdapat kekosongan 1 jabatan perangkat desa (kasi pemerintahan)
2	Tunjangan BPD bulan Januari-Maret	6.750.000	Terdapat kekosongan 1 jabatan anggota BPD mulai bulan Oktober 2024 an. Asmadi
3	Posyandu Gerbang Mas (8 posyandu @ 9.000.000)	72.000.000	Belum dilengkapi foto penyerahan dana
4	PKK	25.000.000	Belum dilengkapi Berita acara penyerahan dana dan foto penyerahan
5	Perjalanan Dinas ke Jatim Expo persiapan KDKMP	820.000	Nomor surat tugas belum di isi
6	Pembanguna saluran irigasi tersier (1790 x 120)	156.387.800	Progres pengerjaan 80%



2. Desa Kebonagung

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Kebonagung dengan Pagu Rp. 51.903.060 pembayaran Rp. 23.590.837 (45,45%) sisa Rp. 28.312.223 (54,55%) untuk pembayaran hari ini belum ada.

- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Krajan II dengan volume 250m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 284.518.000 belum ada progress (material tersedia)
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Silap Perangkat Desa bulan Januari-Maret	65.519.154	terdapat kekosongan 2 jabatan perangkat desa (kasi pelayanan dan Kasun Kebonarang)
2	Pembelian BBM Januari	400.000	Terdapat selisih antara kwitansi dan nota BBM 500.000,- (lebih 100.000)
3	Pembelian BBM Februari	300.000	Terdapat selisih antara kwitansi dan nota BBM 250.000,- (kurang 50.000)
4	Pembelian bahan makanan untuk anak stunting	3.000.000	Belum ada dokumen pendukung berupa nota, foto barang, foto penyerahan
5	Pengadaan buku bacaan perpustakaan desa	10.000.000	Belum ada dokumen pendukung berupa dokumen kontrak, nota, foto barang, foto penyerahan
6	Pembelian bahan material pembangunan JUT Dusun Krajan II	122.250.000	Belum ada dokumen pendukung berupa dokumen kontrak, nota, foto barang (belum realisasi)
7	Honor Tim penyusun dokumen perubahan	2.500.000	belum ada lampiran tanda terima



3. Desa Klanting

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Klanting dengan Pagu Rp. 44.974.404 pembayaran Rp. 16.055.293 (35,70%) sisa Rp. 28.919.111 (64,30%) untuk pembayaran hari ini belum ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Wringinsari RT 004 RW 003 Dengan volume 45,5m x 0,3m x 0,75m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 25.000.000 progress pengerjaan masih 70% (material tersedia)

- Rehab Gedung Posyandu Dusun Wringinsari RT 001 RW 003 Dengan volume 4m x 16,5m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 46.862.000 progress pengerjaan masih 40% (material tersedia)
- Pembangunan Sumur Resapan dengan volume 10 titik Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 10.000.000 progress pengerjaan masih 40% (4 sumur yang sudah selesai) (material tersedia. Catatan : tidak ada papan penunjuk lokasi sumur resapan)

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Pelatihan Paralegal BPD	1.500.000	tidak ada undangan dari instansi penyelenggara, surat tugas dari desa, SPPD sebagai dasar mengeluarkan uang saku, materi pelatihan, foto kegiatan
2	Bantuan makanan untuk anak Stunting	10.000.000	SPJ dalam proses pengerjaan di Bidan Desa
3	Rapat kordinasi dengan Babinsa dan Babinmas	4.000.000	SPJ dalam proses pengerjaan (belum dilengkapi undangan, daftar hadir, notulen, foto)
4	Desa Siaga Kesehatan	10.500.000	SPJ dalam proses pengerjaan di Bidan Desa
5	Rehab Balai Posyandu	46.862.000	Dokumen kontrak belum ditandatangani, progres pembangunan 60 %
6	Kegiatan SOTH	12.100.000	SPJ dalam proses pengerjaan TP PKK
7	Pembangunan sumur resapan 10 titik	10.000.000	progres pembangunan 40 % (4 lokasi), dokumen belum ditandatangani
8	Pengadaan CCTV Desa 5 titik	16.000.000	Pelaksanaan pemasangan menunggu dari CV
9	Saluran Irigasi Dusun Ringinsari RT 4 RW 3	25.000.000	Dokumen kontrak belum ditandatangani, progres pembangunan 40%



4. Desa Sumberejo

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Sumberejo dengan Pagu Rp. 120.500.203 pembayaran Rp. 31.457.609 (26,11%) sisa Rp. 89.042.594 (73,89%) untuk pembayaran hari ini belum ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan Jalan Paving Dusun Blimbing RT 011 RW 003 dengan volume 177m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 35.400.000 progress pengerjaan masih 1% (material tersedia, papan proyek tidak ada, proses perataan jalan)
 - Rehab Jalan Lingkungan Dusun Klingsi RT 035 RW 009 dengan volume 200m x 3m rumah Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 256.500.000 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia)
 - Pembangunan jalan lingkungan Pavingisasi Dusun Sekar Putih RT 006 RW 002 dengan volume 223,5m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 35.482.000 progress pengerjaan belum dikerjakan(material tersedia)
 - PJU Tenaga Surya dengan volume 6 unit Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 90.000.000 progress pengerjaan belum dikerjakan (material proses pemesanan)
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Tunjangan Perangkat Desa	65.446.260	terdapat kekosongan 2 jabatan perangkat desa (Kasi Kesra dan Kasun Sekar Putih)
2	Belanja ATK bulan Januari	725.000	belum ada foto barang
3	Pembelian listrik	500.000	terdapat selisih antara kwitansi dan struk pembayaran 252.174 (kurang 247.826)
4	Tagihan Air	600.000	terdapat selisih antara kwitansi dan struk pembayaran 212.700 (kurang 387.300)
5	Insentif RT/RW bulan Januari-Maret	34.800.000	Berita acara penyerahan dana dari kepala desa ke Ketua Paguyuban RT/RW belum ditandatangani ketua paguyuban, sampai dengan dilaksanakan monev belum ada tanda terima penyerahan dana ke ketua RT/RW
6	Sosialisasi wajib pajak	20.000.000	belum realisasi (SPP tgl 14/3/2025)
7	Pembelian materai	500.000	belum ada foto barang
8	Cetak banner	600.000	belum ada foto barang
9	Tagihan air bulan Maret	300.000	belum realisasi
10	Tanda terima honor petugas perpustakaan	600.000	belum ditandatangani penerima honor
11	PKK	6.000.000	belum ada Berita Acara dan foto penyerahan dana (SPP tgl 28/5/2025)
12	Rehab jalan dusun klingsi RT 35 RW 09 (200 x 3)	256.500.000	Dokumen kontrak belum ada, progres 0% (masih pesan material) (SPP tgl 28/5/2025)
13	Paving Blimbing RT 11 RW 3 (59 x 3)	35.400.000	Dokumen kontrak belum ada, progres 0% (masih pesan material) (SPP tgl 28/5/2025)
14	Paving Sekar putih RT 6 RW 2 (223,5)	35.482.000	Dokumen kontrak belum ada, progres 0% (masih pesan material) (SPP tgl 28/5/2025)
15	Wifi desa	10.000.000	belum realisasi menunggu juknis lebih lanjut dari Kominfo (SPP tgl 28/5/2025)
16	Pemasangan PJUTS 6 titik	90.000.000	Dokumen kontrak belum ada, progres 0% (masih pesan material) (SPP tgl 28/5/2025)



5. Desa Kutorenon

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Kutorenon dengan Pagu Rp. 211.404.234 pembayaran Rp. 105.166.700 (49,75%) sisa Rp. 106.237.534 (50.25%) untuk pembayaran hari ini tidak ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan Rabat Saluran Irigasi Dusun Krajan II dengan volume 500m Sumber Anggaran (Bagi Hasil) TA 2025 Rp. 272.800.000 progress pengerjaan masih 70% (material tersedia, papan proyek belum terpasang)
 - Rehab Perbaikan atap teras kantor desa Dusun Krajan I RT 001 RW 004 dengan volume 18m x 2m Sumber Anggaran (Bagi Hasil) TA 2025 Rp. 26.660.000 progress pengerjaan sudah 100% (Selesai)
 - Pembangunan Rabat Bahu Jalan Dusun Biting 2 RW 11 dengan volume 85m Sumber Anggaran (Bagi Hasil) TA 2025 Rp. 19.200.000 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia)

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Siltap perangkat desa Januari-Maret	58.967.154	terdapat kekosongan 3 jabatan perangkat desa (Kasun Krajan 1, Biting 1 dan Kasun Kepuh)

2	Belanja ATK bulan Maret	1.150.000	Cek stempel pada kwitansi dan nota
3	Upah tukang pembangunan saluran irigasi krajan 2	44.487.570	belum ada tanda terima penerima upah
4	pembangunan saluran irigasi krajan 2	180.276.250	progres pembangunan 60 %, papan kegiatan tidak ada
5	Upah tukang rehab rabat bahu jalan Biting 2	4.270.000	belum ada tanda terima penerima upah dan KTP tukang
6	pembangunan saluran irigasi krajan 2	12.405.000	progres pembangunan 30 %, papan kegiatan tidak ada
7	Upah tukang rehab atap teras kantor	9.330.000	belum ada tanda terima penerima upah dan KTP tukang
8	Rehab atap teras kantor	15.830.000	progres 100%
9	Tunjangan perangkat desa (PAD)	180.000.000	belum ada tanda terima penerima tunjangan

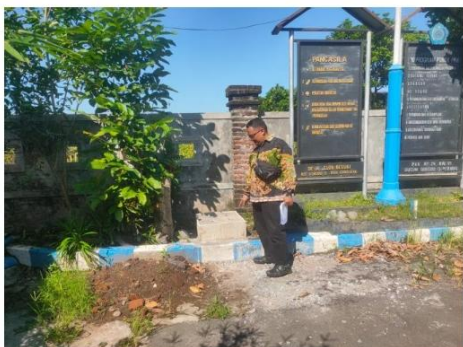


6. Desa Selokbesuki

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Selokbesuki dengan Pagu Rp. 110.738.594 pembayaran Rp. 47.593.475 (42,98%) sisa Rp. 63.145.119 (57,02%) untuk pembayaran hari ini belum ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan Wetan RT 017 – 023 RW 004 dan RT 014-016 RW 003 dengan volume 142,72m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 348.500.000 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia 80drum aspal dari kebutuhan 90 aspal sisa belum dikirim penyedia)
 - Penerangan Jalan Umum Dusun Perumahan Sukodono RT 027 RW 005 dan RT 029 RW 006 dengan volume 2 titik Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 30.000.000 progress pengerjaan masih 50% (material tersedia pengecoran tempat PJU) RAB tidak ada

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Pembelian lemari arsip kantor	4.500.000	Belum realisasi (uang di pelaksana anggaran An. Ahmad Ubaidillah) SPP tgl 15 Mei 2025
2	Pengadaan laptop kantor desa	15.000.000	Nomor register surat perjanjian kerjasama dan surat serah terima barang belum diisi, pelaksana anggaran (Ahmad Ubaidillah) belum tanda tangan
3	PJUTS 2 titik lokasi RW 6 dan RW 5 Dusun Sukodono permai tinggi 6 m spek lampu 80 watt	30.000.000	progres 50% (pengeroran pondasi), belum ada papan kegiatan
4	Rehap jalan aspal (lapen) Dusun Krajan Wetan 1115 cm x 260 cm x 6,5 cm	192.608.721	progres 0%, material 100 %, belum ada papan kegiatan



7. Desa Bondoyudo

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Bondoyudo dengan Pagu Rp. 46.711.610 pembayaran Rp. 20.229.085 (43,31%) sisa Rp. 26.482.525 (56,69%) untuk pembayaran hari Rp. 4.000.000.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Peningkatan jalan Dusun Rejo Agung RT 009 RW 002 dengan volume 245m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 53.242.540 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia aspal 12 drum)
 - Pembangunan Jalan Paving Dusun rejo Agung RT 002 RW 001 dengan volume 54,50m x 1,50m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 17.302.550 progress pengerjaan sudah selesai.

- Peningkatan Jalan Desa Dusun Rejo Agung RT 010 Rw 002 dengan volume 100m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 20.062.320 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia, aspal 4drum)

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Siltap perangkat desa	46.008.346	terdapat kekosongan 3 jabatan perangkat desa pada jabatan Kasi Kesra, Kasun Krajan Baru, Kasun Alas Malang
2	Pembelian benda pos	250.000	belum ada foto barang
3	Honor lembur bulan Januari-Februari	200.000	Nomor surat perintah lembur tanggal 7 dan 24 Januari, 7 Februari belum ditulis/masih kosong
4	Honor pengurus barang	400.000	Belum ditanda tangani petugas barang aaaaaaa. Rohmania
5	Gerbangmas	36.000.000	BA Penyerahan dana 4 Gerbangmas belum ada nmr register
6	PKK	10.000.000	BA Penyerahan dana PKK belum ada nmr register
7	PMT Stunting	16.000.000	SPJ dalam proses pengerjaan di Bidan Desa selaku pelaksana anggaran, pajak sudah dipotong tapi belum disetor karena menunggu faktur dari rekanan
8	Pembelian sarpras Polindex belupa 1 unit kasur dan 6 alat tensi	6.100.000	SPJ dalam proses pengerjaan di Bidan Desa selaku pelaksana anggaran, pajak sudah dipotong tapi belum disetor karena menunggu faktur dari rekanan
9	Paving RT 2 RW 1	17.302.500	Tanda terima upah dan KTP pekerja belum ada. Dokumen kontrak belum ada karena menunggu bfaktur dari rekanan. Progres pembangunan 100%, belum ada prasati dan papan kegiatan
10	Rehab jalan Dusun Rejoagung RT 9 dan 10	73.904.540	belum realisasi dikarenakan masih menunggu panen tebu karena lokasi pembangunan ada di sekitar perkebunan tebu. Menunggu Faktur dari rekanan

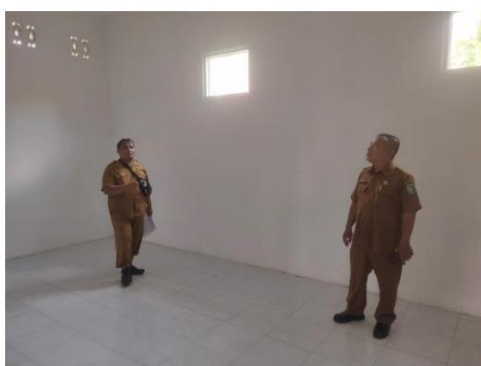


8. Desa Selokgondang

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Selokgondang dengan Pagu Rp. 114.046.193 pembayaran Rp. 93.818.742 (82,26%) sisa Rp. 20.227.451 (17,74%) untuk pembayaran hari ini tidak ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan darinase Dusun Laspoleng RT 007 RW 002 dengan volume 181m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 150.000.000 progress pengerjaan masih 30% (material tersedia)
 - Pembangunan Paving Halaman Musholah Dusun Krajan Kidul dengan volume 25m x 6,30m Sumber Anggaran (Bagi Hasil) TA 2025 Rp. 28.838.837 progress pengerjaan sudah selesai.
 - Pembuatan Ornamen Papan Nama Akrilik (nama desa) dengan volume 1 unit Sumber Anggaran (Anggaran Dana Desa) TA 2025 Rp. 15.000.000 progress pengerjaan sudah selesai.
 - Rehabilitasi Gedung Aula PKK dengan volume Sumber Anggaran (Anggaran Dana Desa) TA 2025 Rp. 10.000.000 progress pengerjaan sudah selesai.

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Siltap perangkat desa	65.446.260	terdapat kekosongan 3 jabatan perangkat desa pada jabatan Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kasun Krajan Kidul
2	Pembelian ATK BPD	690.000	belum ada foto barang
3	Mamin rapat BPD	140.000	Foto kegiatan
4	Gerbangmas (6 gerbangmas)	108.000.000	Belum ada BA penyerahan dana
5	PKK	27.000.000	Belum ada BA penyerahan dana
6	Pemeliharaan sarpras polindes (teralis, pengecatan)	1.000.000	Nota teralis
7	Pembelian kipas angin Polindes (2 buah)	1.000.000	Nota pembelian barang
8	Pembangunan drainase dusun Laspoleng RT 07 RW 02	150.000.000	Honor Timlak 5.000.000 belum ada tanda terima, Upah tukang 59.330.328 belum ada tanda terima dan KTP pekerja. Progres 30 %
9	Paving	28.889.109	progres 100%
10	Pemasangan papan nama desa	15.000.000	Buat perubahan RAB karena ketidaksesuaian anggaran dan kegiatan





9. Desa Uranggantung

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Uranggantung dengan Pagu Rp. 28.537.912 pembayaran Rp. 705.290 (2,47%) sisa Rp. 27.832.622 (97,53%) untuk pembayaran hari ini belum ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Pembangunan TPT Dusun Krajan II RT 008 RW 003 dengan volume 240m x 0,3m x 0,7m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 70.000.000 progress pengerjaan masih 20% (material tersedia, papan proyek tidak ada)
 - Peningkatan jalan Aspal Permukaan (Lapen) Dusun Krajan III dengan volume 368m x 3m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 135.000.000 progress pengerjaan belum dikerjakan (material tersedia aspal 16 drum kurang 14 drum)
 - Pembangunan Gorong gorong Dusun Krajan III RT 016 RW 005 dengan volume 6,7m x 3m x 0,12m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 26.500.000 progress pengerjaan sudah selesai prasasti belum terpasang.
 - PJU RAB tidak ada.
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Silpa perangkat desa	65.446.260	terdapat kekosongan 1 jabatan perangkat desa pada kaur Perencanaan segera tindaklanjuti proses pemberhentian sesuai aturan yang berlaku
2	Pengadaan kursi pimpinan rapat (silpa 2024)	6.712.700	belum realisasi (SPP nomor 0017/SPP/15.2008/2025 tanggal 14 Mei 2025
3	Pembangunan Rabat Beton RT 03 RW 01	26.400.000	Belum realisasi
4	Pembangunan gorong-gorong RT 16 RW 05	22.500.000	progres pembangunan 100 %, prasasti belum terpasang
5	Lapen RT 15, 16 RW 5	60.202.000	belum realisasi (RAP pembelian aspal seharusnya 30 drum, yang sudah ada dilokasi 16 drum)
6	PJU 1, 2, 3, 4 RW 01 (6 titik)	10.500.000	Yang realisasi hanya tiang saja, belum terpasang dan belum terinstal
7	TPT RT 08 RW 03	70.000.000	progres pengerjaan 20 %, papan kegiatan tidak ada
8	Rabat beton RT 08 RW 03	38.600.000	belum realisasi
9	Bantuan Satgas Kamdes	6.000.000	belum realisasi
10	PMT Bayi/balita dan ILP	7.200.000	Dana sudah diserahkan kepada Gerbangmas tapi belum ada BA penyerahan, rincian barang dan foto barang (SPJ dalam proses pengerjaan di Gerbangmas)

11	Visual Data/papan data	600.000	Dana sudah diserahkan kepada Gerbangmas tapi belum ada BA penyerahan, rincian barang dan foto barang (SPJ dalam proses pengerjaan di Gerbangmas)
12	Insentif Kader untuk 3 Gerbangmas	8.000.000	Dana sudah diserahkan kepada Gerbangmas tapi belum ada BA penyerahan, tanda terima insentif (SPJ dalam proses pengerjaan di Gerbangmas)
13	ATK PKK	803.000	Dana sudah diserahkan kepada TP PKK tapi belum ada BA penyerahan, rincian barang dan foto barang (SPJ dalam proses pengerjaan di TP PKK)
14	Cetak penggandaan PKK	227.000	Dana sudah diserahkan kepada TP PKK tapi belum ada BA penyerahan, rincian barang dan foto barang (SPJ dalam proses pengerjaan di TP PKK)
15	Belanja Mamin PKK	8.970.000	Dana sudah diserahkan kepada Gerbangmas tapi belum ada BA penyerahan, undangan, notulen, daftar hadir, foto)



10. Desa Karang Sari

- a. Rekap terakhir pada bulan Juni 2025 Realisasi Pembayaran Pajak PBB untuk Desa Karang Sari dengan Pagu Rp. 224.930.575 pembayaran Rp. 92.585.683 (41,16%) sisa Rp. 132.344.892 (58,84%) untuk pembayaran hari ini belum ada.
- b. SK kelembagaan desa (PKK, RT RW, Gerbangmas, Karang Taruna satlinmas) sudah diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Cek fisik Pembangunan
 - Rehab Gedung Serba Guna Dusun Sidodadi RT 001 RW 007 dengan volume 1 unit Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 300.000.000 progress pengerjaan masih 5% (material tersedia, papan proyek tidak ada)

- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik keluarga miskin dengan volume 1 rumah Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 10.000.000 progress pengerjaan masih 70% (material tersedia)
- Pembangunan jalan rabat Beton Dusun Sidosari RT 005 RW 012 dengan volume 0,30m x 0,90m x 169m Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 100.000.000 progress pengerjaan masih 5% (material tersedia, proses galian)
- Pembangunan TPT/Plengsengan Dusun Sidosari RT 005 RW 012 dengan volume 0,3m x 0,9m x 169m sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 60.000.000 progress pengerjaan masih 70% (material tersedia)
- Pemeliharaan Lapangan dengan volume 1 unit Sumber Anggaran (Dana Desa) TA 2025 Rp. 50.036.000 progress pengerjaan masih 40% (material tersedia)

d. Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa :

NO	URAIAN PENGGUNAAN DANA	ANGGARAN	CATATAN
1	Siltap perangkat desa	78.696.048	terdapat kekosongan 3 jabatan perangkat desa pada kasi pelayanan, kasi Sidomukti, kasun Sidodadi
2	ATK dan benda pos	500.000	belum realisasi (kwitansi nmr 00055/KWT/15.2003/2025 tanggal 8 Mei 2025
3	Rehab atap gedung serbaguna (UMKM)	300.000.000	ganti atap multiroof, pasang plafon PVC. progres 5 %, material tersedia pasir, papan kegiatan belum ada
4	Pembangunan saluran irigasi (TPT satu sisi) tersier RT 5 RW 12	60.000.000	Progres 70%, papan proyek ada
5	Finishing Sport Center/rehab	50.000.000	progres 40%, papan proyek tidak ada
6	Pembangunan Rabat Beton 2,5 x 159,6 RT 5 RW 12	100.000.000	Belum realisasi menunggu masa panen padi, karena lokasi pembangunan berada di persawahan
7	Mamin rapat	1.000.000	Belum realisasi
8	Honor Tim penyusun Perdes Perubahan RPJMDesa	1.000.000	belum realisasi
9	Honor Tim penyusun Perdes Perubahan RKP dan APBDesa	1.000.000	belum realisasi



F. PENUTUP

Kesimpulan dan saran

1. Berkaitan dengan hasil Pembinaan Administrasi tersebut diatas diharapkan kepada Kepala Desa untuk segera menugaskan perangkat atau staf yang membidangi untuk menyelesaikan dan mencukupi segala kekurangan dalam berkas SPJ kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa maupun dari Dana Desa;
2. Demi kelancaran proses pembangunan diharapkan dipersiapkan dengan baik sehingga tidak menghambat proses pembangunan.
3. Ada beberapa desa terdapat kekosongan Perangkat, Desa diharapkan segera melaksanakan penjarangan perangkat desa antara lain :
 - a. Desa karangsari 3 Jabatan Kosong (Kasi Pelayanan, Kasun Sidomukti dan Kasun Sidodadi);
 - b. Desa Urangantung 1 Jabatan (Kaur Perencanaan);
 - c. Desa Selogondang 3 Jabatan (Kasi Kesra, Kasi Pelayanan dan Kasun Krajan Kidul);
 - d. Desa Bondoyudo 3 Jabatan (Kasi Kesra, Kasun Krajan Baru dan Kasun Alas Malang);
 - e. Desa Kutorenon 3 Jabatan (Kasun Krajan 1, Kasun Biting 1 dan Kasun Kepuh);
 - f. Desa Sumberejo 2 Jabatan (Kasi Kesra dan Kasun Sekar Putih);
 - g. Desa Kebonagung 2 Jabatan (Kasi Pelayanan dan Kasun Kebonagung);
 - h. Desa Dawuhan Lor 1 Jabatan (Kasi Pemerintahan).

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Semester I Tahun 2025 dalam rangka menjaga tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang disampaikan terima kasih.

Lumajang, 30 Juni 2025

CAMAT SUKODONO



DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM

NIP. 19771023 200501 1 009

Hasil pelaksanaan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan Sukodono

Periode : Tribulan II Tahun 2025

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Target yang dilayani Tribulan II Tahun 2025	Jumlah Pelayanan yang difasilitasi pada Tribulan II Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan.	1.150	855	74,34%
2	Fasilitasi Usulan proposal LKSA	2	0	0
3	Fasilitasi Pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	1	0	0
4	Fasilitasi Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan Umum	1	0	0
5	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	75	114	152%
6	Fasilitasi pada Surat keterangan Domisili perusahaan (SKDP)	6	2	33,3%
7	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	75	31	41,33%
8	Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat	5	0	0
9	Fasilitasi evaluasi Rancangan Peraturan Desa	10	0	0
10	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas Di Desa	7	0	0
11	Fasilitasi Pernyataan/Keterangan/Izin (Surat pernyataan belum menikah, surat keterangan belum memiliki rumah/surat izin keramaian)	10	0	0
12	Pelayanan konsultasi, informasi dan pengaduan	2	0	0%
JUMLAH		1.344	969	72,09%

KESIMPULAN

Capaian Pelayanan Paten Pada Tribulan II tahun 2025 adalah 72,09%

KENDALA

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut:

Alat perekaman KTP untuk Kecamatan Sukodono rusak sehingga selama ini kecamatan sukodono tidak bisa melakukan perekaman, untuk perekaman KTP diarahkan ke Dinas Kependudukan.

Lumajang, 02 Juli 2025

Mengetahui,

CAMAT SUKODONO



DIAN NURWISUDA, S.Psi, MM

0411071023 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/55/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Sukodono.
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/3/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 83.48
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 81.74
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 4, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/ Tarif, 3) Produk Pelayanan, dan 4) Penanganan Pengaduan.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 5, yaitu : 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Kompetensi Pelaksana,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Perilaku Pelaksana, dan 5) Sarana dan Prasarana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : "Jam pelayanan harus sesuai".

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Sukodono>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon/ Faksimile (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 5 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/72/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : Penyampaian nilai sementara hasil pengisian PEKPPP mandiri
Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas/Satpol PP/Badan;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda;
5. Camat se-Kab. Lumajang.

di
Lumajang

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah nomor : 000.8.3.4/8/427.16/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri tahun 2025, selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2025 terhadap 103 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) atas pengisian kuesioner F-01 dan F-03 telah tuntas dilakukan pengisian oleh masing-masing UP3 mulai tanggal 23 Januari 2025 hingga batas akhir pengisian pada tanggal 25 April 2025;
2. Bagi 97 UP3 yang telah tuntas mengisi kuesioner F-01 dan F-03 disampaikan **apresiasi positif**;
3. Sedangkan, bagi 6 UP3 **yang belum mengisi kuesioner F-01** (Dindikbud, Disarpus, Kec. Jatiroto, Bag. PBJ, Puskesmas Candipuro dan Puskesmas Sumbersari) agar segera melakukan pengisian formulir F-01 paling lambat hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 dan melakukan konfirmasi pengisian kepada PIC evaluator dalam kesempatan pertama untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi bukti dukung oleh evaluator. Adapun untuk 15 UP3 **yang belum memenuhi target pengisian kuesioner F-03 (terlampir)** agar segera mengirimkan formulir F-03 kepada pengguna layanan;
4. Setelah dilakukan olah data, verifikasi dan validasi terhadap bukti dukung yang menggambarkan kondisi UP3 Saudara, terdapat beberapa bukti dukung **yang tidak relevan dan responden F-03 yang belum memenuhi target**. Adapun nilai sementara hasil PEKPPP Mandiri tahun 2025 **sebagaimana terlampir**;
5. Selanjutnya untuk memaksimalkan hasil penilaian PEKPPP Mandiri, diminta kepada Saudara untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan sekaligus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melengkapi bukti dukung yang kurang sesuai paling lambat hari **Rabu tanggal 30 Juli 2025**. Adapun link berita acara masing-masing UP3 dapat diunduh melalui https://bit.ly/BA_PEKPPP2025;

6. Koordinasi lanjutan terkait pemenuhan bukti dukung dapat menghubungi masing-masing PIC yang telah ditunjuk;
7. Bagi OPD yang memiliki unit kerja dibawah koordinasi Saudara agar **menginformasikan** sekaligus **memastikan** pemenuhan bukti dukung tepat waktu.

Demikian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan :

1. Bupati Lumajang;
2. Wakil Bupati Lumajang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	UP3	NILAI IPP TAHUN 2025				KET.	PIC
		TOTAL		KATEGORI			
		NILAI	INDEKS	URAIAN	HURUF		
55	Puskesmas Pronojiwo	51,08	2,55	Cukup	C		5
56	Puskesmas Tempursari	51,18	2,56	Cukup	C		3
57	Dispar	51,39	2,57	Cukup	C		1
58	Bakesbangpol	52,12	2,61	Cukup	C		5
59	Disnaker	52,59	2,63	Cukup	C		1
60	UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan	52,84	2,64	Cukup	C		3
61	Puskesmas Kunir	53,10	2,66	Cukup	C		3
62	Diskominfo	53,26	2,66	Cukup	C		4
63	Diskopindag	53,77	2,69	Cukup	C		5
64	Puskesmas Senduro	53,98	2,70	Cukup	C		2
65	Kecamatan Sukodono	54,12	2,71	Cukup	C		4
66	Kecamatan Tempursari	55,20	2,76	Cukup	C		4
67	BPKD	55,45	2,77	Cukup	C		2
68	RSUD Pasirian	55,53	2,78	Cukup	C		5
69	Puskesmas Klakah	56,53	2,83	Cukup	C		1
70	Puskesmas Pasirian	56,66	2,83	Cukup	C		1
71	UPT Labkes	57,09	2,85	Cukup	C		1
72	Kecamatan Ranuyoso	57,89	2,89	Cukup	C		2
73	Kecamatan Sumbersuko	57,90	2,90	Cukup	C		3
74	DPUTR	57,99	2,90	Cukup	C		1
75	Diskan	58,94	2,95	Cukup	C		5
76	Kecamatan Pasirian	59,00	2,95	Cukup	C		4
77	Puskesmas Sukodono	59,01	2,95	Cukup	C		5
78	Puskesmas Rogotrunan	59,34	2,97	Cukup	C	Belum memenuhi target pengisian	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 883210, Faksimile (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

BERITA ACARA

**HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 Mei 2025, telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik pada **Kecamatan Sukodono** Pemerintah Kabupaten Lumajang, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terdapat catatan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1	KEBIJAKAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak tersedia Standar Pelayanan2. Penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait (stakeholder).3. Tersedia publikasi SP hanya sebagian dari komponen service delivery baik pada media cetak/non elektronik maupun media elektronik4. Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan5. Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan dan isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku6. Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM7. SKM dipublikasikan pada 1 (satu) media publikasi8. Tindak lanjut hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam penyusunan dokumen SP mohon untuk menambahkan bukti dukung berupa dokumen SP yang dilampirkan pada SK SP, BA, foto dan notulen2. Dalam penyusunan dokumen SP mohon untuk menambahkan bukti dukung berupa BA, daftar hadir penyusunan SP, notulen dan foto kegiatan3. Publikasi dokumen SP dapat di tambahkan bukti dukung berupa foto publikasi pada media cetak, media elektronik, media sosial, aplikasi dan SIPPN4. Peninjauan ulang secara berkala pada dokumen SP dapat di buktikan dengan : BA FKP terkait peninjauan ulang SP, Laporan peninjauan ulang SP, laporan/dokumen penyusunan SP tahun sebelumnya dan foto kegiatan5. Menambahkan bukti dukung berupa SK maklumat pelayan dan disertai bukti dokumentasi publikasi seperti media cetak, elektronik, website dan medsos6. SKM dapat di tambahkan bukti dukung publikasi melalui media elektronik, medsos, website , aplikasi dan papan reklame7. Pada indikator rekomendasi hasil SKM dan kecepatan tindak lanjut hasil SKM dapat menambahkan bukti dukung berupa laporan SKM tahun

NO	KOMPONEN ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
		SKM dilaksanakan 30-80%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya 9. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 3 bulan setelah laporan SKM diterbitkan	2023 triwulan 1 .s.d 4 dan SKM 2024 semester 1 yang dilampiri rencana tindak lanjut dan tindak lanjut
2	PROFESIONALISME SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan jam pelayanan / kerja dan 1 unsur lainnya 2. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 4 (empat) unsur lainnya 3. Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja 4. Ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan 1-2 unsur kecuali kinerja 5. Pelaksana pelayanan menerapkan 2 (dua) unsur budaya pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan dapat di buktikan dengan : SK jam pelayanan di luar jam dinas, surat perintah lembur, surat tugas pemberian pelayanan pada hari libur foto dokumentasi kegiatan disertai dengan penjelasan 2. Kode etik perlu menambahkan unsur hak pegawai 3. mekanisme untuk meningkatkan motivasi kerja petugas pelayanan dapat di tambahkan bukti dukung berupa foto : program konseling khusus pegawai dan capacity building dan program biasiswa 4. SK pemberian penghargaan dapat di tambahkan unsur kinerja, kehadiran, kerja sama, inovatif, penampilan dan tidak pernah menerima complain dari pengguna layanan yang bersifat personal 5. Penerapan budaya layanan dapat ditambahkan bukti dukung berupa PIN, aturan tentang 5 S, motto Kecamatan Sukodono dan core Values ASN BerAKHLAK
3	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat parkir dan memiliki 1 fasilitas parkir 2. Tersedia fasilitas wajib dan 2 fasilitas pelengkap 3. Toilet pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi 4. Tersedia 1-3 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan 5. Tersedia 3 fasilitas penunjang 6. Tersedia sarana FO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir dengan fasilitas pendukung dapat ditambahkan bukti dukung berupa foto : petugas parkir, kartu parkir, CCTV, penitipan jaket/helm dan kanopi 2. fasilitas ruang tunggu dapat di tambahkan bukti dukung berupa foto : kursi tunggu, mesin/nomor antrian, televisi, wifi dan air minum 3. sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai dapat di tambahkan bukti dukung berupa monev toilet 4. Sarpras kelompok rentan dapat

NO	KOMPONEN ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
		informasi layanan dengan 4 fasilitas	<p>di tambahkanbukti dukung berupa foto : pintu masuk yang mudah di akses, ramp, selasar, toilet khusus, loket khusus, ruang tunggu khusus, parkir khusus, area bermain anak dan ruang laktasi</p> <p>5. Sarpras penunjang dapat di tambahkan bukti dukung berupa foto mesin fotocopy, APAR, area merokok di luar ruang pelayanan, jalur evakuasi/titik kumpul, CCTV dan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah</p> <p>6. Sarana front office dapat di tambahkan bukti dukung berupa bahan cetak informasi layanan</p> <p>7. Ctt. : Untuk sarana dan prasarana pendukung dan penunjang yang kurang memadai agar diusulkan perbaikan/pemeliharaan/pengad aan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tahun 2026.</p>
4	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi pelayanan publik telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional 2. Tidak tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik 3. SIPP Elektronik tidak terhubung secara daring 4. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik telah dilakukan secara semesteran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIPP pendukung operasional dapat dibuktikan dengan screenhoot apk. SP4N_Lapor, SIMAK, FAQ pada website dan foto kuesioner SKM 2. kualitas penggunaan SIPP elektronik dapat di buktikan dengan menambahkan screenshot website yang di link kan pada SIPPN 3. pemutakhiran data dan informasi dapat di buktikan dengan foto informasi pelayanan yang di upload pada medsos setidaknya 5 informasi pelayanan secara berturut-turut
5	KONSULTASI DAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 3 kondisi 2. Terdapat media konsultasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka dapat di tambahkan bukti dukung berupa foto : ruang khusus pengaduan, air minum dan makanan ringan dan

NO	KOMPONEN ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
		<p>pengaduan secara offline menyatu satu dengan front office dan tersedia secara online</p> <p>3. Terdapat dokumentasi yang diarsipkan</p> <p>4. < 50% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! dan ditindaklanjuti hingga selesai.</p>	<p>register konsultasi dan pengaduan</p> <p>2. sarana dan media konsultasi dapat di tambahkan bukti dukung berupa screenshot jumlah pengaduan pada SP4N_Lapor dan SK petugas pengaduan</p> <p>3. Akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan dapat di tambahkan bukti dukung berupa laporan pengaduan berkala. Adapun format dapat di sesuaikan dengan Perbup 26 tahun 2024</p>
6	INOVASI	<p>1. Tidak tersedia Inovasi</p> <p>2. Belum ada sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi</p> <p>3. Tersedia sistem antrian dengan 1 fasilitas</p>	<p>1. Penciptaan inovasi dapat di buktikan dengan bukti dukung proposal, dokumen studi tiru, dokumentasi pelaksanaan inovasi dan bukti keikutsertaan/piagam dalam kompetisi inovasi pelayanan publik</p> <p>Ctt.: Apabila telah memiliki inovasi dan proposal inovasi yang disertai pengesahan oleh Kepala OPD, selanjutnya agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan inovasi ;</p> <p>2. sumber daya yang mendukung untuk keberlanjutan inovasi dapat di buktikan dengan payung hukum, dokumen penganggaran, sarpras dan SK tim inovasi</p> <p>3. fasilitas sistem antrian dapat di ditambahkan dengan bukti dukung berupa : peneras suara, petugas pemandu, pengelompokan antrian, sistem pendaftaran daring dan monitor antrian</p>
7	CATATAN LAIN-LAIN	<p>1. Agar diusulkan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan melalui program pendidikan dan pelatihan tentang pemahaman terkait pelayanan inklusif dan GEDSI (<i>Gender, Equality, Disability dan Social Inclusion</i>)</p> <p>2. Apabila ada yang perlu dikonfirmasi terkait hal-hal dimaksud dapat menghubungi Abdillah (HP: 085646829649)</p>	


Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Lumajang, 27 Mei 2025

Mengetahui,
SEKRETARIS / KEPALA UPT
**)pilih salah satu*

PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK

EVALUATOR UP3

.....
.....

ABDILLAH

Realisasi Anggaran 2025



No	Program	Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.708.456.311	1.691.070.183	747.176.761	44,18%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.022.500	7.800.000	0	0%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	160.700.500	159.104.500	16.637.500	10,46%
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	2.400.000	33,33%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.400.000	23.400.000	1.350.000	5,77%

3. Data Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA 2025 CAMAT SUKODONO | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	25%	25%	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	0%	0%	
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	10%	10%	
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	33%	33%	
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	80%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	
Capaian Rata-rata					24%	

No	Program	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.708.456.311	Rp 747.176.761	DAU	44%	0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 8.022.500	Rp -	DAU	0%	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 160.700.500	Rp 16.637.500	DAU	10%	0
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	DAU	33%	0
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 23.400.000	Rp 1.350.000	DAU	6%	0
Jumlah		Rp 1.907.779.311	Rp 767.564.261		40%	

Sukodono, 01 Juli 2025
Camat Sukodono


DIAN NURWISUDAH K.H.P., S.Psi, MM
NIP.19771023 200501 1 009

PENGUKURAN KINERJA 2025 SEKRETARIS CAMAT SUKODONO | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Optimalnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18%	18%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
2	Optimalnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	48%	48%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
3	Optimalnya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	0%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
4	Optimalnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	19%	19%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
5	Optimalnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	18%	31%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
6	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21%	25%	Pencapaian Realisasi LRA dan Kinerja Subag
Capaian Rata-rata					24%	

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efesiensi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.203.000	Rp 1.840.000	DAU	18%	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.374.599.182	Rp 654.808.049	DAU	48%	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1.422.750	Rp -	DAU	0%	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 41.514.979	Rp 7.823.370	DAU	19%	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 202.677.600	Rp 63.370.342	DAU	31%	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 78.038.800	Rp 19.335.000	DAU	25%	0
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.708.456.311	Rp 747.176.761	DAU	44%	0
Jumlah		Rp 1.708.456.311	Rp 747.176.761		44%	

Sukodono, 01 Juli 2025
Pit. Sekretaris Kecamatan



DEWI AFRILIYANTI, SE
NIP. 19790415 201001 2 014

PENGUKURAN KINERJA 2025

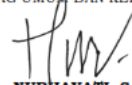
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	dokumen
2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	1 laporan	15%	laporan
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0%	paket
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	paket
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0%	paket
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6 laporan	50%	laporan
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50%	laporan
8	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	3 unit	50%	unit
9	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31 Unit	0 unit	0%	unit
Capaian Rata-rata					46%	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 500.000	Rp -	DAU	0%	0
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 922.750	Rp -	DAU	0%	0
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.539.125	Rp -	DAU	0%	0
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 21.203.990	Rp 6.623.370	DAU	31%	0
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.771.864	Rp -	DAU	0%	0
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 11.000.000	Rp 1.200.000	DAU	11%	0
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 45.000.600	Rp 13.167.254	DAU	29%	0
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 57.938.800	Rp 19.335.000	DAU	33%	0
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.100.000	Rp -	DAU	0%	0
Jumlah		Rp 165.977.129	Rp 40.325.624		24,30%	

Sukodono, 01 Juli 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NURHAYATI, S.H
NIP. 19801029 201001 2 003

PENGUKURAN KINERJA 2025

KASUBBAG KEUANGAN | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	67%	dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	0%	dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	dokumen
4	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2 laporan	40%	laporan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	0 laporan	0%	laporan
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	12 orang	12 orang	100%	orang
7	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	6 dokumen	50%	dokumen
8	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	laporan
9	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	0 dokumen	0%	dokumen
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50%	laporan
Capaian Rata-rata					51%	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.719.000	Rp 1.840.000	DAU	49%	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.000.000	Rp -	DAU	0%	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.000.000	Rp -	DAU	0%	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.484.000	Rp -	DAU	0%	0
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.000.000	Rp -	DAU	0%	0
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.342.387.182	Rp 645.604.049	DAU	48%	0
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 29.712.000	Rp 9.204.000	DAU	31%	0
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.000.000	Rp -	DAU	0%	0
9	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 500.000	Rp -	DAU	0%	0
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 157.677.000	Rp 50.203.088	DAU	32%	0
Jumlah		Rp 1.538.760.182	Rp 705.011.137		46%	

Sukodono, 01 Juli 2025
KASUBAG KEUANGAN



DEWI AFRILIYANTI, SE
NIP. 19790415 201001 2 014

PENGUKURAN KINERJA 2025

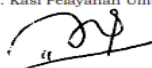
KASI PELAYANAN UMUM | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	0%	0%	Desa
2	Optimalnya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	0%	0%	Desa
Capaian Rata-rata					0%	

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 5.772.500	Rp -	DAU	0%	-
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 2.250.000	Rp -	DAU	0%	-
Jumlah		Rp 8.022.500	Rp -		0%	

Sukodono, 01 Juli 2025
Plt. Kasi Pelayanan Umum



ROMAWATI BIANA, S.Sos
NIP. 19820623 201101 2 015

PENGUKURAN KINERJA 2025

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	5%	5%	pokmas
2	Optimalnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	20%	20%	Desa

Capaian Rata-rata

13%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 107.750.500	Rp 5.837.500	DAU	5%	0
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 52.950.000	Rp 10.800.000	DAU	20%	0
JUMLAH		Rp 160.700.500	Rp 16.637.500		10%	

Sukodono, 01 Juli 2025
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

HAIZAH, S.Pd

NIP. 19701219 200903 2 001

PENGUKURAN KINERJA 2025

KASI PEMERINTAHAN | KECAMATAN SUKODONO

Triwulan II (April - Juni 2025)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	Dokumen
2	Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	8 Desa	0 Desa	0%	Desa
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	10 Desa	10 Desa	100%	Desa
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	10 Desa	0 Desa	0%	Desa

Capaian Rata-rata

38%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket	Capaian	Efisiensi
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 7.200.000	Rp 2.400.000	DAU	33%	0
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 23.400.000	Rp 1.350.000	DAU	6%	0
Jumlah		Rp 30.600.000	Rp 3.750.000		12%	

Sukodono, 01 Juli 2025
Kasi Pemerintahan

AZ MASHURI, SH

NIP. 19690914 199403 1 008